

## Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah

**Destin Anggita<sup>1)</sup>, Syarifah Ratih Kartika Sari<sup>2)\*</sup>, Siti Suharni<sup>3)</sup>**

Program Studi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No 79, Madiun, 63133

*\*Corresponding Author: [syarifah@unmer-madiun.ac.id](mailto:syarifah@unmer-madiun.ac.id)*

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of the quality of financial reports, the use of information technology, and public accountability on the performance accountability of the Directorate General of Rights Determination and Land Registration. This type of research is a quantitative research. The population in this study amounted to 120 people and the sample amounted to 93 people. The technique in taking the sample using random sampling technique. Data collection techniques using questionnaires and documentation. The data analysis technique used multiple linear regression. The third variable can affect the accountability of the performance of the Directorate General of Determination of Rights and Land Registration by 48.3%.*

**Keywords:** *Financial report quality, Technology utilization, Public accountability and Performance accountability.*

### PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang berada di Jakarta Selatan merupakan bagian unit kerja teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Direktorat Jenderal PHPT pada tanggal 2 September 2020 terjadi perubahan struktur organisasi kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai konsekuensi perubahan kementerian, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Tabel 1

Hasil Evaluasi LKJ Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Thn 2015-2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	32,54	20,62	27,13	27,13	27,13	27,13
Pengukuran Kinerja	29,91	14,69	18,13	18,13	19,06	19,06
Pelaporan Kinerja	19,83	8,68	13,35	13,35	12,55	12,55
Evaluasi Kinerja	-	5,50	8,02	8,56	8,63	8,63
Pencapaian Sasaran	-	16,00	17,07	16,72	16,63	16,63
Jumlah Nilai	82,29	65,48	83,69	83,89	83,99	83,99
Kategori Nilai	A	B	A	A	A	A

Sumber : atrbpn.go.id, 2021

Berdasarkan tabel 1 di atas Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dalam kurun waktu 6 tahun sempat mengalami penurunan nilai dari A ke B pada tahun 2016.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016 yang menyebabkan penurunan nilai yaitu (atrbpn.go.id):

1. Adanya perintah/instruksi penghematan anggaran tahap II dan pengalokasian anggaran untuk sharing tukin yang tidak ditindaklanjuti dengan pengambilan anggaran yang tidak dapat digunakan (blokir) tersebut, menyebabkan capaian realisasi anggaran tahun 2016 menjadi tidak maksimal.

2. Terbatasnya jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Hubungan Hukum Keagrariaan dalam melaksanakan tugas-tugas dukungan manajemen.

Pemanfaatan teknologi informasi bagi Direktorat Jenderal PHPT pada tahun 2016 target dapat terealisasi dengan baik, perangkat yang digunakan untuk menunjang kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal PHPT yaitu komputer, laptop, printer, mesin fotocopy, proyektor, mesin penghancur kertas, mesin pemotong kertas.

Berdasarkan fenomena diatas pemanfaatan teknologi dapat membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai. Capaian realisasi anggaran yang tidak maksimal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga pada tahun 2016 kualitas laporan keuangan mengalami penurunan. Terbatasnya jumlah pegawai juga dapat mempengaruhi akuntabilitas publik, karena tanggungjawab dalam melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dapat terganggu atau terhambat. sehingga pada tahun 2016 akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT mengalami penurunan.

Berdasarkan kejadian diatas perlu adanya kajian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategik instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban pertanggungjawaban atas kegagalan dan keberhasilan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT menurut Mardiasmo (2018:181) adalah kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Mardiasmo (2018:181) Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat diandalkan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Kualitas laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan berupa melakukan proses pencatatan, penganalisaan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi atau kejadian ekonomi yang berkaitan dengan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sehingga dengan adanya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Ridzal (2020), bahwa baik tidaknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menunjukkan baik tidaknya pula akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT menurut Razi (2017), Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap individu dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah memanfaatkan segala bentuk teknologi informasi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya teknologi informasi dapat membantu aparat pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya, dengan begitu pekerjaan akan lebih cepat selesai dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Soleman R., Soleman R., & Zainuddin (2019), apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat karena pemanfaatan teknologi merupakan perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT menurut Mardiasmo (2018:181) adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah dilakukan kepada pihak pemberi mandat. Dengan tersedianya pegawai yang memadai dapat memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Damayanti (2017), dengan adanya akuntabilitas publik pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

Dari uraian diatas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah"

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 25. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Direktorat PHPT yang terdiri dari 120 orang. Teknik sampel yang digunakan yaitu teknik random sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Jumlah sampel yang diperoleh dari rumus slovin sebanyak 93 orang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada responden. Sedangkan data sekunder berasal dari web ATR/BPN dan pegawai BPN.

##### A. Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003).

##### B. Kualitas Laporan Keuangan ( $X_1$ )

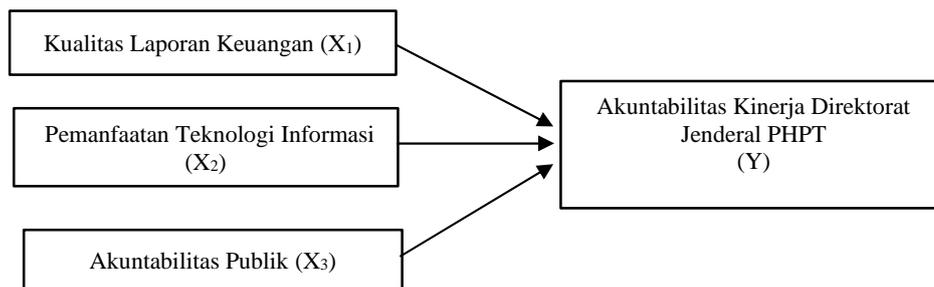
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Mardiasmo, 2018). Pemanfaatan informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personal yang mengoprasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

C. Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_2$ )

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap individu dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatannya, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi yang digunakan (Razi,2017).

D. Akuntabilitas Publik ( $X_3$ )

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawaban tersebut.



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas laporan keuangan ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
2. Pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
3. Akuntabilitas Publik ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi
- $X_1$  = Kualitas Laporan Keuangan
- $X_2$  = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- $X_3$  = Akuntabilitas Publik
- $\epsilon$  = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

1. Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Normalitas

Tabel 2  
Hasil Uji Normalitas Menggunakan  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual	
N	93

Unstandardized Residual		
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.95391623
Most Extreme Differences	Absolute	0.067
	Positive	0.062
	Negative	-0.067
Test Statistic		0.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
  - Calculated from data.
  - Lilliefors Significance Correction.
  - This is a lower bound of the true significance.
- Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Unstandardizes Residual sebesar 0,200 > 0,05, artinya variabel dalam penelitian terdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinieritas

Tabel 3  
 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	Keterangan		
		Tolerance	VIF	
1	Kualitas Laporan Keuangan	0.630	1.587	Lolos Uji Multikolinieritas
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.668	1.497	Lolos Uji Multikolinieritas
	Akuntabilitas Publik	0.912	1.096	Lolos Uji Multikolinieritas

- Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
- Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk kualitas laporan keuangan sebesar 1,587, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1,497, dan akuntabilitas publik sebesar 1,096. Sedangkan nilai tolerance dari kualitas laporan keuangan sebesar 0,630, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,668, dan akuntabilitas publik sebesar 0,912. Karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4  
 Hasil Uji Heteroskedastisitas Berdasarkan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
					B
1	(Constant)		0.344	0.732	
	Kualitas Laporan Keuangan	-0.012	0.055	-0.212	0.833
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.040	0.080	0.495	0.622
	Akuntabilitas Publik	0.022	0.060	0.362	0.718

- Dependent Variable: ABRESID
- Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas signifikansi dari semua variabel diatas tingkat kepercayaan yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5  
 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.048	3.619		2.224	0.029
Kualitas Laporan Keuangan	0.563	0.103	0.516	5.465	0.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.310	0.150	0.189	2.064	0.042
Akuntabilitas Publik	0.229	0.112	0.160	2.035	0.045

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 5, model persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = + 1 \cdot X_1 + 2 \cdot X_2 + 3 \cdot X_3 +$$

$$Y = 8,048 + 0,563x_1 + 0,310x_2 + 0,229x_3 +$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koefisien konstanta berdasarkan hasil regresi adalah 8,048, menyatakan bahwa jika menghasilkan nilai  $X_1, X_2$ , dan  $X_3$  adalah nol, maka dari itu nilai  $Y$  adalah sebesar 8,048.
- Koefisien regresi variabel kualitas laporan keuangan  $X_1$  sebesar 0,563, menunjukkan bahwa setiap kenaikan  $X_1$  sebesar satu satuan akan meningkat nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT ( $Y$ ) sebesar 0,563 satuan.
- Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi  $X_2$  sebesar 0,310, menunjukkan bahwa setiap kenaikan  $X_2$  sebesar satu satuan akan meningkat nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT ( $Y$ ) sebesar 0,310 satuan.
- Koefisien regresi variabel akuntabilitas publik  $X_3$  sebesar 0,229, menunjukkan bahwa setiap kenaikan  $X_3$  sebesar satu satuan akan meningkat nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT ( $Y$ ) sebesar 0,229 satuan.

## 3. Uji Hipotesis

- Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Tabel 6  
 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.707 <sup>a</sup>	0.500	0.483	1.987

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang diperoleh adalah 0,483. Artinya bahwa variasi dan ketiga variabel bebas, yaitu kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas publik memberikan kontribusi pada akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT sebesar 48,3% sedangkan 51,7% lainnya dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Misalnya ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan transparansi.

b. Uji Simultan (F)

Tabel 7  
 Hasil Uji Simultan (F)

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	351.043	3	117.014	29.650	0.000 <sup>b</sup>
	Residual	351.237	89	3.946		
	Total	702.280	92			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel III.13 dapat dilihat  $F_{hitung}$  sebesar 29,650 lebih besar dari  $F_{tabel}$  sebesar 8,557 dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan ( $X_1$ ), pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ), dan akuntabilitas publik ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT.

c. Uji Parsial (t)

Tabel 8  
 Hasil Uji Parsial (t)

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.048	3.619		2.224	0.029
	Kualitas Laporan Keuangan	0.563	0.103	0.516	5.465	0.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.310	0.150	0.189	2.064	0.042
	Akuntabilitas Publik	0.229	0.112	0.160	2.035	0.045

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa :

- 1) Pengaruh variabel kualitas laporan keuangan ( $X_1$ ) terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT (Y).  
 Sesuai dengan tabel diatas, nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,465 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 dan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05, sehingga variabel kualitas laporan keuangan ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT (Y).
- 2) Pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT (Y).  
 Sesuai dengan tabel diatas, nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,064 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 dan nilai sig sebesar 0,042 < 0,05, sehingga variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT (Y).
- 3) Pengaruh variabel akuntabilitas publik ( $X_3$ ) terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT (Y).  
 Sesuai dengan tabel diatas, nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,035 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 dan nilai sig sebesar 0,045 < 0,05, sehingga variabel akuntabilitas publik ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal PHPT (Y).

B. Pembahasan

1. Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hasil uji parsial ( $t$ ) diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,465 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Dengan demikian hipotesis 1 ( $H_1$ ) diterima.

Kualitas laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-transaksi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan berupa melakukan proses pencatatan, penganalisaan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi atau kejadian ekonomi yang berkaitan dengan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sehingga dengan adanya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ridzal (2020), bahwa variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. Baik tidaknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menunjukkan baik tidaknya pula akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hasil uji parsial ( $t$ ) diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,064 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 dan nilai signifikansi sebesar 0,042 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Dengan demikian hipotesis 2 ( $H_2$ ) diterima.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah memanfaatkan segala bentuk teknologi informasi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya teknologi informasi dapat membantu aparatur pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya, dengan begitu pekerjaan akan lebih cepat selesai dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Soleman R., Soleman R., & Zainuddin (2019), bahwa variabel pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat karena pemanfaatan teknologi merupakan perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kerjanya.

3. Pengaruh akuntabilitas publik terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hasil uji parsial ( $t$ ) diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,035 >  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 dan nilai signifikansi sebesar 0,045 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Dengan demikian hipotesis 3 ( $H_3$ ) diterima.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah dilakukan kepada pihak pemberi mandat. Dengan tersedianya pegawai yang memadai dapat memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Damayanti (2017), bahwa variabel akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di SKPD di Kabupaten Deli Serdang. Dengan adanya akuntabilitas publik pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
3. Akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

### B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka peneliti memberikan saran bagi Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pegawai akuntansi atau keuangan yang terlibat secara langsung dapat meningkatkan kualitas laporannya dengan memenuhi keempat unsur yang sesuai dengan PP No.7 tahun 2010.
2. Diharapkan bagi pegawai untuk memanfaatkan teknologi informasi lebih baik lagi sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan pekerjaan yang dilakukan lebih cepat selesai dan efisien.
3. Diharapkan bagi instansi untuk meningkatkan akuntabilitas publik sehingga aktivitas mulai dari melaporkan, menyajikan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tidak terhambat.

### C. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Terkait dengan penelitian ini, peneliti menyadari masih ada kekurangan sehingga diperlukan penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel dalam penelitiannya seperti ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan transparansi.

1. Ketaatan pada peraturan perundangan  
Menurut Razi (2017), ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan bangsa dan bernegara.
2. Pengendalian akuntansi

Menurut Razi (2017), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan.

3. Kompetensi aparatur pemerintah daerah  
Menurut Razi (2017), standar kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas jabatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akoto, R. K., & Vitor, D. A. (2014). What Determines the Debt Policy of Listed Manufacturing Firm in Ghana? *International Business Research*, Vol. 7 No. 1.
- Andina, Z. (2013). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Brigham & Houston. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brigham & Houston. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chandrasekharan, C. V. (2012). Determinants of Capital Structure in the Nigerian Listed Firms. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, Vol. 1 No. 2.
- Cortez, M. A., & Susanto, S. (2012). The Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence From Japanese Manufacturing Companies. *Journal of International Business Research*, Vol. 11 No. 3.
- Damayanti, Suci. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan.
- Desmintari & Yetty, F. (2016). Effect Of Profitability, Liquidity, and Assets Structure on the Company Debt Policy. *International Journal Of Business Commerce*, Vol. 5 No. 06.
- Ehikioya, B. I. (2018). An Empirical Analysis of the Determinants of Corporate Debt Policy of Nigerian Firms. *International Journal of Economics and Financial Research*, Vol. 4.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Program Eviews*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. (2012). Determinan Kebijakan Hutang. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, Vol. 1.
- Hidayat, A. (2013). Pengaruh Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 3.
- Husnan, S. (2012). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Indraswary, H. U., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014. *Journal Of Accounting*, Vol. 2.
- Irawan, A., Arifati, R., & Oemar, A. (2016). Pengaruh Aset Berwujud, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Lama Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Journal Of Accounting*, Vol. 2.
- Jatmiko, B. P. (2018). Sariwangi, Si Pelopor Teh Celup di Indonesia yang Berakhir Tragis, 18 Oktober. Diakses pada 25 April 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/17/222200326/utang-rp-1-triliun-perusahaan-teh-sariwangi-dinyatakan-pailit?page=all>.
- Joni & Lina. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12.

- Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Laporan Keuangan Tahunan. Diakses pada 9 September 2019. <https://www.idx.co.id>.
- Linda, Lautania, M. F., & Arfandynata, M. (2017). Determinan Kebijakan Hutang: Bukti Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 4.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
- Margaretha, F. (2014). Determinants of Debt Policy in Indonesia's Public Company. *Rev. Integr. Bus. Econ. Res*, Vol. 3.
- Munawir. (2014). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Myers, S. C. (1984). The Capital Stuctur Puzzle. *The Journal Of Finance*, Vol. 39.
- Narita, R. M. (2012). Analisis Kebijakan Hutang. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1 No. 2.
- Ozkan, A. (2001). Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long Run Target: Evidence from UK Company Panel Data. *Journal of Business Finance & Accounting*, Vol. 1.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Republik Indonesia No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Pithaloka, N. D. (2009). Pengaruh Faktor-Faktor Intern Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang: dengan Pendekatan Pecking Order Theory. Skripsi. Universitas Lampung.
- Prayogi, D. A., Susetyo, B., & Subekti. (2016). Pengaruh Struktur Aktiva, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Permana*, Vol. 7 No. 2.
- Prayudi, A. S. (2010). Pengaruh Institutional Ownership, IOS, Firm size, Cash From Operation dan Profitability terhadap Kebijakan Hutang. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Primantara, D. Y., & Dewi, M. R. (2016). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, dan Pajak terhadap Struktur Modal. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5 No. 5.
- Putra, D., & Ramadhani, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Jasa Yang Listing di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8.
- Rajagukguk, L., Widyastuty, E., & Pakpahan, Y. (2017). Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden, Struktur Aset, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 17.
- Ramadhani, S., & Barus, A. C. (2018). Kebijakan Hutang pada Perusahaan Sektor Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. *JWEM STIE MIKROSKIL*, Vol. 8.
- Razi, Riska Fahrul. (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon*, V.4, No 1, halaman 1268-1281.
- Ridzal, Nining Asniar. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, V.6, No 1, halaman 87-97.
- Rifai, M. H. (2015). Pengaruh Risiko Bisnis, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Struktur Aktiva terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Sektor Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riyanto, S & Hatmawan, A. A.. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif. Deepublish.Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV Alfabeta.
- Rosa, A. M. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen, Profitabilitas dan Free Cash Flow terhadap Kebijakan Hutang. Artikel Ilmiah: STIE Perbanas.
- Sapitri, E. (2018). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sinaga, G. Y. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Free Cash Flow, Struktur Aset, Likuiditas, Profitabilitas, dan Risiko Bisnis terhadap Kebijakan Hutang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Soleman, R., Soleman, R & Zainuddin (2019) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Hibualamo Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan*, V.3, No 1, halaman 31-37.

- Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No 6. Diakses pada 17 Juli 2019. [https://www.fasb.org/pdf/aop\\_CON6.pdf](https://www.fasb.org/pdf/aop_CON6.pdf).
- Steven & Lina. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 13.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, L. (2010). *Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: Gramedia.
- Surya, D., & Rahayuningsih, D. A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 14.
- Suryani, A. D. (2015). Pengaruh Free Cash Flow, Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan Deviden dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2013. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Susanti, F. (2014). Pengaruh Likuiditas, Kebijakan Deviden, Struktur Aset, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal Akuntansi*. Diakses pada 10 Agustus 2019. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Jurnal+Akuntansi%2C+Faria+Susanti+2014&btnG](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Jurnal+Akuntansi%2C+Faria+Susanti+2014&btnG)
- Trisnawati, I. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 18.
- Tussakdiyah, Nurhasanah. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Utami, S. P. S. (2018). Dwi Aneka Jaya Kemasindo dalam pailit punya utang Rp 1,15 triliun, 3 Januari. Diakses pada 23 Agustus 2019. <https://nasional.kontan.co.id/news/dajk-dalam-pailit-punya-utang-rp-115-triliun>.  
[www.atrbpn.go.id](http://www.atrbpn.go.id) diakses 17 Oktober 2021, jam 09.00 WIB.
- Yeniatie & Destriana, N. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang pada Perusahaan NonKeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12.
- Yuana, Y. E., Rambe, P. A., & Ratih, A. E. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal: Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Diakses pada 12 Agustus 2019. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Yuana%2C+Yuda+Eka%2C+Prima+Aprilyani+Rambe%2C+dan+Asri+Eka+Ratih.+2018.+&btnG](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Yuana%2C+Yuda+Eka%2C+Prima+Aprilyani+Rambe%2C+dan+Asri+Eka+Ratih.+2018.+&btnG)
- Yusrianti, H. (2013). Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Struktur Asset, dan Growth Opportunity terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang telah Go Public di Bursa Efek Indonesia. Laporan Penelitian Dana Fakultas Ekonomi Unsri. Diakses pada 20 Agustus 2019. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Yusrianti%2C+Hasni.+2013&btnG](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Yusrianti%2C+Hasni.+2013&btnG)